

Accepted: Filled Out by the Editor | Published: Filled Out by the Editor

**PENGELOLAAN POTENSI WISATA DI KOTA SABANG SEBAGAI
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Analisis *WellBeing* Terhadap Masyarakat)**

RAHMIYATI

Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: asyafrawa@gmail.com

Abstrak

Dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional, Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya dengan menggali potensi yang ada agar dapat dijadikan sebagai sumber keuangan daerah. Kota Sabang sebagai kawasan yang memiliki potensi wisata dengan prospek yang cerah untuk dikembangkan khususnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sabang. Umumnya, pengembangan sektor pariwisata mencakup pertumbuhan ekonomi melalui terciptanya lapangan kerja, berkembangannya industri-industri pendukung kegiatan pariwisata serta perdagangan barang dan jasa dalam rangka peningkatan *wellbeing* masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat *wellbeing* masyarakat sebagai *output* dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kota Sabang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dari lapangan diperoleh dengan wawancara dengan stakeholder terhadap objek penelitian dan dengan pengamatan pada lokasi penelitian di kawasan-kawasan wisata Kota Sabang. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan potensi wisata melalui mekanisme pelayanan yang optimal dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah kemudian berimbas pada pembangunan sektor riil yang juga menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat melalui bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga terciptanya *wellbeing* dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

Kata Kunci: *Potensi Wisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Masyarakat, Wellbeing.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari peran serta daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara utuh dan terpadu sebagai bagian internal dari pembangunan nasional. Oleh karena itu Daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya untuk menggali potensi yang ada agar dapat dijadikan sebagai sumber keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999), disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi meliputi; pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan dan Lain-lain merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 157 telah diatur tentang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah; Dana perimbangan; Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya, dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu sumber dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, daerah harus mampu mengembangkan sektor kepariwisataan.

Kota Sabang merupakan bagian dari Daerah Provinsi Aceh yang memiliki potensi alam luar biasa telah mampu mendatangkan banyak keuntungan sebagai sumber PAD bagi pemerintah dalam peningkatan perekonomian masyarakat, yang pada saat ini sektor pariwisata sebagai sumber PAD belum dimanfaatkan secara optimal.

Secara Geografis, Kota Sabang terletak pada koordinat $05^{\circ} 46' 28'' - 05^{\circ} 54' 28''$ Lintang Utara (LU) dan $95^{\circ} 13' 02'' - 95^{\circ} 22' 36''$ Bujur Timur (BT). Kota Sabang sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Benggala dan di sebelah barat dibatasi oleh Samudera Indonesia. Secara administratif, Kota Sabang terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya serta terbagi menjadi 18 Gampong (desa). Luas keseluruhan daratan Kota Sabang adalah 153 km^2 , terdiri dari Kecamatan Sukajaya seluas 80 km^2 dan Kecamatan Sukakarya seluas 73^2 .¹

Kawasan Sabang yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tentu saja hal ini memberikan kesempatan kepada Kota Sabang terutama dalam hal peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan pariwisata itu sendiri. Kenyataan

¹ Profil Kota Sabang Tahun 2013

selama ini memperlihatkan bahwa sektor pariwisata mempunyai peranan penting dalam perekonomian Kota Sabang.

Dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan untuk melakukan *travelling*, pola berfikir maupun sifat perkembangan pariwisata itu sendiri.²

Merujuk pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Bab I Pasal I dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan melakukan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara dengan tujuan terpenting adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan hiburan, bukan untuk mencari nafkah.

Dalam artian yang lebih sempit, kata “wisata” yang digabungkan dengan kata “pari” menjadi pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta. *Pari* berarti “berulang-ulang” sedangkan wisata adalah “perjalanan atau bepergian”. Jadi, pariwisata dapat diartikan adalah perjalanan yang dilakukan berulang-ulang untuk mengunjungi suatu tempat.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.⁴

Secara umum, Pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan terkait dengan perjalanan sementara waktu yang dilakukan manusia yang bersifat multidimensi sebagai bentuk kebutuhan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang muncul sebagai wujud kesadaran terhadap diri sendiri dan alam sekitar.

Pada zaman sekarang ini, pariwisata jika ditinjau dari sisi ekonomi adalah lahan bisnis yang akan menghasilkan pundi-pundi keuntungan bagi pengelola tempat atau lokasi dari objek wisata yang menjadi tujuan wisatawan. Hal ini dikarenakan jutaan orang saat ini rela melakukan perjalanan jauh maupun dekat

² Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997) hal. 1

³ R.S. Damardjati, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hal. 125

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Bumi Aksara: Jakarta, 2009)

untuk bersenang-senang dan membahagiakan diri sendiri dengan memanfaatkan waktu luang dan menghabiskan dana di tempat-tempat wisata.

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, serta perdagangan barang dan jasa. Hal ini memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam lingkup *wellbeing* kepada masyarakat sekitar lokasi wisata.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk memahami dan mengeksplorasi pengelolaan potensi wisata di Kota Sabang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena sosial secara holistik melalui deskripsi kata-kata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, di mana peneliti mencari fakta dengan mempelajari masalah-masalah masyarakat dan situasi tertentu untuk memberikan gambaran nyata tentang pengelolaan pariwisata di Kota Sabang.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung lokasi penelitian dan mencatat hal-hal relevan terkait pengelolaan potensi wisata. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah kota dan masyarakat setempat, untuk menggali informasi tersembunyi mengenai kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan wisata. Dokumentasi melengkapi observasi dan wawancara dengan mengumpulkan data dari catatan, buku, dan sumber internet yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat sekitar lokasi wisata di Kota Sabang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, buku, dan dokumentasi kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan kombinasi berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang pengelolaan potensi wisata sebagai sumber PAD dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang.

HASI DAN PEMBASAN

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya.

Sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri, salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah ini adalah bersumber dari kontribusi sektor pariwisata yang direpresentasikan oleh pajak hotel dan pajak restoran.

Selanjutnya, dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu sumber dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, daerah harus mampu mengembangkan sektor kepariwisataan. Dengan berkembangnya pariwisata menjadi suatu industri diharapkan mampu meningkatkan sumbangan Pendapatan Asli Daerah, mengingat pentingnya Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dari pembiayaan bagi pembangunan daerah di samping dana dari Pemerintah Pusat.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah mewujudkan *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktifitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pangalokasian perekonomian masyarakat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan erat dengan tingkat perekonomian masyarakat disekitarnya sebagai dampak timbal balik antara produktifitas masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Peningkatan *Wellbeing* Masyarakat

Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan keniscayaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengurangi angka kemiskinan, menggerakkan kegiatan bisnis dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pembangunan ekonomi itu pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengakselerasi pembangunan di daerah.

Seperti halnya daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia, Kota Sabang juga memiliki agenda dan strategi pembangunan yang menjadi penentu pencapaian visi dan misi pembangunan pada periode 2012-2017. Untuk mencapai visi “Terwujudnya masyarakat Sabang yang maju, mempunyai hak dasar, mandiri, sejahtera dalam pola hidup rukun, mandiri dan mensejahterakan masyarakat Sabang dengan berlandaskan moral keagamaan,” Pemko Sabang melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah 2012-2017 yang berlangsung pada 23-24 Maret 2013 di Aula Bappeda Kota Sabang juga telah menetapkan beberapa prioritas pembangunan Kota Sabang. Salah satu diantaranya yaitu Pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah. Bahkan forum Musrenbang yang diikuti oleh Satuan Kerja Pemerintah Kota Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan elemen masyarakat Kota Sabang, sejumlah kalangan juga ikut menyuarakan perlunya Pemko Sabang dan BPKS lebih memprioritaskan pembangunan sektor pariwisata.

Forum ini juga menyuarakan prioritas pembangunan pariwisata selama satu atau dua tahun ke depan misalnya dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar ke sektor ini dengan meminimalisir alokasi anggaran ke sektor lainnya. Dengan mekanisme alokasi seperti ini, pembangunan infrastruktur, fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata di Sabang diharapkan bisa jadi lebih optimal. Dasar pertimbangannya tidak terlepas dari kemampuan sektor ini yang terbukti

berhasil mengangkat perekonomian, taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Sebagai daerah yang memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata, pembangunan ekonomi di Sabang sebenarnya sudah saatnya fokus ke sektor ini. Apalagi sektor ini telah terbukti mampu mengangkat taraf hidup masyarakat, terutama yang bergerak di industri pariwisata, bisnis dan penyediaan jasa yang terkait dengan pariwisata. Indikasinya dapat dilihat dari realitas kehidupan sehari-hari warga Iboih dan Gapang yang bergerak di sektor pariwisata, seperti menyediakan jasa diving operator, *snorkelling*, memandu wisatawan, menyediakan fasilitas boat kaca, akomodasi (*bungalow* dan *chalet*), cafe dan rumah makan, suvenir dan banyak lagi. Dan merupakan ciri utama pariwisata Sabang yang sejak awal pengembangannya berbasiskan masyarakat (*community based tourism*).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁵

Pariwisata memberikan banyak kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah termasuk Kota Banda Aceh sebagai Ibukota provinsi Aceh. Dari mulanya PAD sekitar Rp. 5 miliar pada tahun 2013 bertambah hingga ratusan miliar pada tahun 2014 dan PAD paling besar didapat dari pajak hotel dan restoran.⁶

Begitu pula dengan Kota Sabang yang memang merupakan wilayah destinasi wisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Berikut tabel jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

| NO. | TAHUN | JUMLAH | KET |
|-----|-------|--------|-----|
|-----|-------|--------|-----|

⁵ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius, 1987). hal. 35

⁶ Illiza Sa'adudin Djamal, *Aceh Tourism*, Garuda Indonesia, Edisi 002 Februari 2014, hal. 59

| | | | |
|---|------|----|-------------------|
| 1 | 2010 | Rp | 16.979.598.032,89 |
| 2 | 2011 | Rp | 23.377.353.422,03 |
| 3 | 2012 | Rp | 24.924.103.828,18 |
| 4 | 2013 | Rp | 27.377.429.919,72 |
| 5 | 2014 | Rp | 42.723.293.975,24 |

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Tabel diatas menunjukkan terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Terlihat bahwa pada tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi peningkatan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa destinasi pariwisata Sabang sedang mengalami pertumbuhan (*growth*) yang ditandai adanya kenaikan penerimaan pajak daerah terutama dari setoran pajak hotel dan restoran

Meskipun, *Wellbeing* tidak hanya dilihat dari sisi kemampuan *financial*. Akan tetapi naiknya pendapatan Daerah yang berimbas pada pembangunan sektor riil juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Hal ini didapatkan melalui wawancara dengan masyarakat sekitar Lokasi wisata. Pak Ismail yang merupakan masyarakat sekitar objek wisata Pantai Sumur tiga, mengatakan bahwa: “*Saya sangat bersyukur dengan dijadikannya pantai sumur tiga sebagai salah satu objek wisata unggulan karena dengan profesi saya sebagai pedagang, tentu saja hal ini dapat membantu meningkatkan penghasilan sehari-hari saya.*”⁷

Selanjutnya hal senada juga disampaikan oleh Pak Hamdani. Menurutnya sebelum objek wisata pantai sumur tiga mengalami pembangunan dan pengembangan yang luar biasa, bengkel yang ia kelola bisa dikatakan sepi pengunjung. Tetapi, sejak pantai ini dijadikan objek wisata unggulan pendapatan dari bengkelnya mengalami peningkatan.

⁷ Wawancara dengan Pak Ismail Warga Gampong Ie Meulee yang berdomisili di sekitar lokasi pantai sumur tiga, pada tanggal 07 September 2015

Selain itu, sebagaimana yang telah dibahas diatas, bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata Iboih dan Gapang lebih merasakan tingginya tingkat kunjungan wisata dalam lima tahun terakhir ini.

Berikut data jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sabang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

| NO. | TAHUN | JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA | JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA | TOTAL |
|-----|-------|----------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 2010 | 121.646 | 3.277 | 124.923 |
| 2 | 2011 | 96.738 | 5.344 | 102.082 |
| 3 | 2012 | 212.165 | 4.622 | 216.787 |
| 4 | 2013 | 401.224 | 4.648 | 405.872 |
| 5 | 2014 | 512.992 | 3.624 | 516.616 |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang.

Meningkatnya jumlah wisatawan tentu saja menaikkan jumlah Pendapatan Asli Daerah terutama yang bersumber dari pajak restoran dan pajak hotel.

Sebagaimana konsep *wellbeing* yang tidak hanya sebatas *welfare*, maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang juga termasuk dari sektor pariwisata ini akan lebih terasa manfaatnya jika dibarengi dengan menambahkan lowongan pekerjaan bagi penduduk setempat sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran.

Berikut Tabel tingkat pengangguran di Kota Sabang dalam lima tahun terakhir.

| NO. | TAHUN | JUMLAH (PERSENTASE %) | KET |
|-----|-------|-----------------------|-----|
| 1 | 2010 | 10,02 | |
| 2 | 2011 | 6,06 | |

| | | |
|---|------|-------|
| 3 | 2012 | 9,53 |
| 4 | 2013 | 12,50 |
| 5 | 2014 | 7,48 |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Sabang

Berkurangnya jumlah pengangguran merupakan sebuah indikasi semakin membaiknya perekonomian daerah yang kemudian mengantarkan pada *wellbeing* masyarakat setempat.

Terminologi *Wellbeing* berbeda dengan *welfare*. *Wellbeing* diartikan sebagai esensi kebaikan dan kebajikan dimana semua elemen atau variabel yang berperan mempunyai keterkaitan satu sama lain dalam interaksi, integrasi dan evolusi dalam hubungan kausalitas. Sedangkan *welfare* adalah esensi kebaikan dan kebajikan yang masih terdapat unsur *tradeoff*.⁸

Sebagai ilustrasi kita bisa melihat Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat meningkatkan *welfare* masyarakat tetapi dalam konsep *wellbeing* yang termasuk kesejahteraan adalah mampu menciptakan lapangan kerja.

Dengan begitu, peningkatan PAD pada tahun 2014 menyebabkan alokasi dana ke sektor pengembangan pariwisata juga meningkat. karenanya, perbaikan infrastruktur pada objek-objek wisata dan pengembangan potensi-potensi wisata baru menjadikan lahan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Sebagai contohnya, sebagaimana diungkap walikota Sabang Zulkifli Adam, bahwa tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lokasi Objek wisata seperti Bango menjadikannya dilirik oleh LIPI untuk dibangun stasiun LIPI yang mampu menampung sekitar ratusan tenaga kerja lokal.⁹

Pada prinsipnya pembangunan pariwisata dituntut mengaplikasikan tiga tujuan utama, yaitu:

⁸ Jadi Suriadi dan Muhammad Zuhilmi, *Pengantar Metodologi Islam: Merintis Jalan Menuju Social Wellbeing*,..., hal. 106-107

⁹ Hasil wawancara dengan Walikota Sabang pada tanggal 7 Januari 2016.

1. Harus mampu meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Harus mampu mewujudkan keadilan sosial, melestarikan serta memperkuat jatidiri, kemandirian bangsa, memperkaya kepribadian, dan mempertahankan nilai-nilai agama, serta berfungsi sebagai agen perdamaian antar bangsa.
3. Harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkesinambungan. Oleh karena itu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat harus dipegang oleh para penentu dan pelaksana kebijakan pembangunan pariwisata.

Apabila ketiga tujuan dalam pembangunan wisata sebagaimana tersebut diatas telah mampu terpenuhi maka peningkatan wellbeing masyarakat merupakan sebuah keniscayaan terutama ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan penduduk di wilayah wisata tersebut.

Tabel Tingkat Kemiskinan di Kota Sabang.

| NO. | TAHUN | JUMLAH (PERSENTASE %) | KET |
|-----|-------|-----------------------|-----|
| 1 | 2010 | 21,69 | |
| 2 | 2011 | 21,31 | |
| 3 | 2012 | 20,51 | |
| 4 | 2013 | 18,31 | |
| 5 | 2014 | 17,02 | |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Sabang

Tingkat kemiskinan yang terus berkurang setiap tahunnya menunjukkan bukti bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah mampu mewujudkan *Wellbeing* masyarakat terutama dengan terciptanya lapangan kerja yang berimbang pada menurunnya jumlah pengangguran.

Sebagai komponen utama dalam pariwisata, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Peran serta masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip diatas, maka kata kunci dari pembangunan pariwisata, khususnya di daerah kita ini adalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat sehingga peduli dengan dunia pariwisata yang kemudian industri pariwisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terciptanya *wellbeing* dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian diatas ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, *pertama*, Kota Sabang yang terletak di sebuah pulau paling barat Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa. Hal ini dapat menjadi daya tarik sekaligus memiliki nilai jual dalam industri pariwisata. Potensi wisata ini telah dikelola dengan baik meskipun belum optimal karena terdapat beberapa hambatan. Namun demikian, hasil dari pengelolaan potensi wisata ini telah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang. *Kedua*, Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata maka akan berimbas pada pembangunan sektor riil yang juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga terciptanya *wellbeing* dalam kehidupan sosial kemasyarakatan penduduk setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Ibnu Mujib, *Problematikan dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat – Daerah*, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009

- Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Sonhadji, dkk, *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 1994
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Chafid Fandeli, *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*, Yogyakarta: Liberti, 1995
- Chookaew, S., dkk., *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in*, Journal of Economics, Business and Management, jilid. III vol. 7, 2015
- Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, *Analisis Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: YKPN, 2002
- Endang Tjitroesmi, *Peran Industri Kepariwisata dalam Perekonomian Nasional dan Daerah*, Jakarta: PSE-LIPI, 2003
- Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, cet ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1966
- Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997
- Gde Pitana dkk, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- I Gde Pita & Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-Dampak Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005

- Indriana, Desiningrum dan Kristiana, *Religiositas, Keberadaan Pasangan dan Kesejahteraan Sosial (Social Well Being) pada Lansia Binaan PMI Cabang Semarang, (Jurnal Psikologi Undip)*, Vol. 10, No.2, Oktober 2011
- Jadi Suriadi dan Muhammad Zulhilmi, *Pengantar Metodologi Islam: Merintis Jalan Menuju Social Wellbeing*, Jawa Tengah: WellBeing Institute, 2015
- James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius, 1987
- J.S. Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. Xxviii, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- John W. Cresswell, *Research Design Quantitative and Qualitative Approach*, London: Sage Publication, 1994
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1986
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet-25, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFU-UUI, 2001
- M. Hafi Anshari, *Kamus Psikologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1996
- M. Noor Rochman Hadjam dan Arif Nasiruddin, *Peranan Kesulitan Ekonomi, Kepuasan Kerja Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Psikologis*, Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2003, No. 2
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia: 1988
- Muhammad Yusuf Musa, *Islam suatu Kajian Komprehensif*, cet ke-1, Jakarta: Rajawali, 1988
- Munirah, L., dan Ismail, H. N., *Muslim Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges, Proceedings of the Taourism and*

Hopitality International Conference, Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, 2012

Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*, Jakarta: Pradnya paramita, 2002

Oka A Yoeti, *Pengantar Ilmu Kepariwisata*, Bandung: Angkasa Yanti, 1996

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet Ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

R.S. Damardjati, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Ryff, C. D. dan Keyes, C. L. M., *The Structure of Psychological Well-Being Revisited*, (Journal of Personality and Social Psychology), 1995, Vol. 69, No. 4

Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* Terj. Frans Gromang, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013

Sukadijo, *System Linkage dalam Pariwisata*, Ujung Pandang: Badang Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indoensia Timur, 1997

Syamsuddin Mahmud, dkk., *Pelabuhan Bebas Sabang 1967*, Banda Aceh: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomo Universitas Syiah Kuala, 1968

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2 cet. 10, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2006

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, *Brosur Wisata Wonderful Indonesia; Where The Wonderful Indonesia Starts From...*

Garuda Indonesia, *Aceh Tourism*, Edisi 002 Februari 2014

Informasi Pariwisata Nusantara, Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang 2007-2012,